



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**TAHUN  
2024**



## **PENGADILAN NEGERI MARISA**

Jalan Pangeran Diponegoro, Kompleks Bloka Plan Marisa, Desa Palopo,  
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Telp.(0443) 2214922, email: [pnmarisa.official@gmail.com](mailto:pnmarisa.official@gmail.com)

Website: [www.pn-marisa.go.id](http://www.pn-marisa.go.id)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PENGADILAN NEGERI MARISA**

Jalan Diponegoro, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo 96265  
Telepon: 0443-2214922, email [pnmarisa.official@gmail.com](mailto:pnmarisa.official@gmail.com), website [www.pn-marisa.go.id](http://www.pn-marisa.go.id)

Nomor : 284 /KPN.W20-U4/HM1.1/2025

Marisa, 31 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) laporan

Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik  
Tahun 2024

Yth. **Sekretaris Mahkamah Agung RI.**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat – DKI Jakarta.

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Marisa tahun 2024;

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PENGADILAN NEGERI MARISA**

Jalan Diponegoro, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo 96265  
Telepon: 0443-2214922, email [pnmarisa.official@gmail.com](mailto:pnmarisa.official@gmail.com), website [www.pn-marisa.go.id](http://www.pn-marisa.go.id)

---

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI  
Periode: Januari – Desember 2024**

## **A. RINGKASAN LAPORAN**

Seiring dengan reformasi birokrasi pemerintah maka tuntutan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi yang melibatkan peran serta masyarakat, di mana keterbukaan informasi publik adalah bagian dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara terutama yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan yang evaluasinya diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Marisa sebagai unit kerja dibawah Mahkamah Agung telah berperan setara aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat baik secara elektronik maupun dokumen cetak;

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung pemberian layanan informasi kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Marisa menyediakan informasi publik secara elektronik melalui sarana berupa website resmi [www.pn-marisa.go.id](http://www.pn-marisa.go.id) serta melalui [www.sippn.menpan.go.id](http://www.sippn.menpan.go.id)

(CariYanklik), selain itu Pengadilan Negeri Marisa juga memberi layanan informasi melalui Meja Informasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta beberapa inovasi Pengadilan Negeri Marisa yang terkait dengan layanan informasi publik. Berikut ini adalah sarana dan prasarana terkait layanan informasi publik yang tersedia di Pengadilan Negeri Marisa:

- a. Website Pengadilan Negeri Marisa di [www.pn-marisa.go.id](http://www.pn-marisa.go.id) yang menyediakan Daftar Informasi Publik serta beberapa inovasi:
  - “Pevita” (Pelayanan PTSP Virtual Pengadilan Negeri Marisa) melalui aplikasi zoom dengan cara scan QR code yang tersedia di website Pengadilan Negeri Marisa;
  - “Maleo” (Pengadilan Negeri Marisa Real-Time System Information) di mana masyarakat bisa mengajukan pertanyaan secara real-time melalui aplikasi Whtasapp pada nomor 085936642009;



Website Pengadilan Negeri Marisa dengan inovasi “Maleo”

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BerAKHLAK & bangga melayani Bangsa

PENGADILAN NEGERI MARISA KELAS II

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Periode Juli - Desember 2024

NO	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBIAYAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA SAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI	
						AKTIF	INAKTIF
1	Profil Pengadilan	Kesejahteraan	Kasubag PUP	Pembayaran / nilai setiap tahun, tempat pembuatan di PN Marisa	Softcopy	1 Tahun	
2	Prosedur bersacara	Kepaniteraan	Panmud Perdata / Panmud Pidana	Pembayaran / nilai setiap tahun, tempat pembuatan di PN Marisa	Softcopy / Hardcopy	1 Tahun	

Daftar Informasi Publik

- b. Meja Informasi pada PTSP Pengadilan Negeri Marisa yang dilengkapi 1 (satu) unit All In One PC dan 1 (satu) unit printer;



Meja Informasi

- c. Meja Customer Service pada PTSP Pengadilan Negeri Marisa yang dilengkapi 1 (satu) unit All In One PC;



Meja Customer Service

- d. 1 (satu) unit TV LED 32" di ruang PTSP yang menampilkan antrian PTSP;



Monitor display antrian PTSP

- e. 1 (satu) unit TV LED 32" di ruang PTSP yang menampilkan siaran TV Nasional;



Monitor siaran TV Nasional

- f. 1 (satu) unit TV LED 32" di ruang tunggu/pengunjung sidang yang menampilkan jadwal sidang;



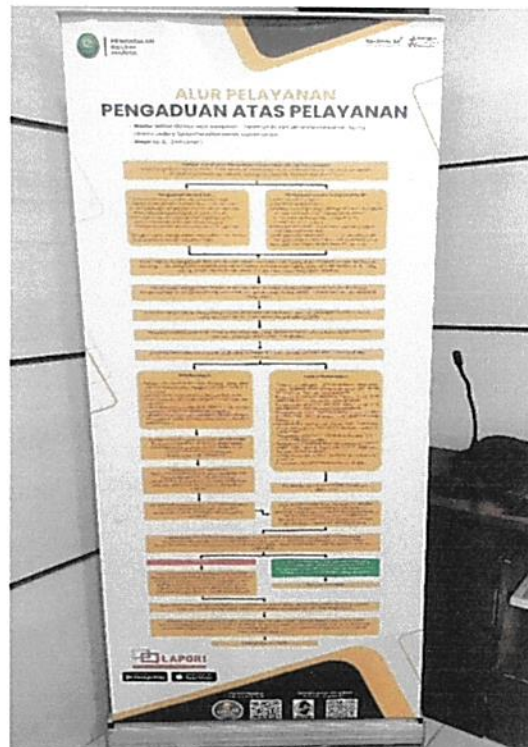


- i. 1 (satu) *banner* di ruang PTSP yang menampilkan Daftar Inovasi Pengadilan Negeri Marisa;



Banner Inovasi

- j. 1 (satu) *banner* di ruang PTSP yang menampilkan alur Pengaduan atas Pelayanan di Pengadilan Negeri Marisa;



Banner alur pengaduan

## **2. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 976/KPN.W20-U4/SK/OT1.1/VII/2024 Tentang Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Marisa dengan susunan:

- a. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Marisa) sebagai Dewan Pertimbangan;
- b. Effendy Kadengkang, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa) sebagai Dewan Pertimbangan;
- c. Suardi Adam, S.H. (Panitera) sebagai Dewan Pertimbangan;
- d. Yurni Nento, S.Kom (Sekretaris) sebagai Atasan PPID;
- e. David Mandagi, S.E., S.H. (Panmud Hukum) sebagai PPID;
- f. M. Frangky F. Ngajow, S.H. (Panmud Perdata) sebagai PPID Pelaksana;
- g. Arit Tri Wibowo, S.H. (Panmud Pidana) sebagai PPID Pelaksana;
- h. Fachru Rozi Dunggio, A.Md. (Kasub Bag Ortala) sebagai PPID Pelaksana;
- i. Iswan Paudi, A.Md. (Kasub Bag PTIP) sebagai PPID Pelaksana;
- j. Ramelan Hamdani Pakaya (Jurusita) sebagai Petugas Informasi;

Karena kekurangan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Marisa maka Petugas Informasi masih dirangkap oleh Jurusita.

## **3. Anggaran**

Dalam DIPA Pengadilan Negeri Marisa tidak terdapat anggaran khusus untuk pengelolaan pelayanan informasi publik, tapi ada beberapa anggaran yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu:

- Anggaran langganan webhosting untuk website;
- Anggaran pembuatan spanduk;
- Anggaran langganan internet dan video conference yang bisa mendukung inovasi terkait pelayanan informasi publik;
- Anggaran ATK;
- Anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin.

### C. DATA LAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	7	1 jam	7	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1 jam</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi Di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Marisa dalam memberikan pelayanan informasi publik bisa berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu:

### **1. Kendala Eksternal:**

- Masyarakat pemohon informasi belum memahami apa yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan;
- Masih banyak masyarakat yang masih awam dengan penggunaan teknologi informasi sehingga Petugas Informasi kesulitan mengarahkan pemohon informasi untuk mengunduh informasi yang sudah tersedia secara elektronik;
- Infrastruktur terkait teknologi informasi yang masih terbatas di daerah sehingga ada wilayah yang belum terjangkau sinyal seluler;
- Adanya pemohon informasi yang belum memiliki gawai atau telepon genggam yang bisa mengakses informasi secara elektronik;

### **2. Kendala Internal:**

- Kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Marisa sehingga Jurusita harus merangkap sebagai Petugas PTSP Meja Hukum sekaligus sebagai Petugas Informasi dan Pengaduan;
- Kurangnya pemahaman Petugas Informasi terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Berdasarkan kendala-kendala yang diuraikan diatas maka untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik memerlukan beberapa perbaikan, peningkatan serta pengadaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasaranan. Untuk itu kami sampaikan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

### **1. Rekomendasi:**

- Penambahan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Marisa;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya struktur PPID terkait pemahaman terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

- Pengadaan sarana dan prasarana berupa All In One PC dengan fitur layar sentuh untuk akses informasi secara digital oleh pengguna layanan di ruang PTSP;
  - Tersedianya anggaran untuk sosialisasi terkait pelayanan informasi publik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan kepada masyarakat;
2. Rencana Tindak Lanjut:
- Mengusulkan penambahan sumber daya manusia kepada Sekretaris Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Gorontalo;
  - Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk diadakannya pelatihan atau sosialisasi terkait Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan kepada masyarakat untuk Petugas Informasi dan Struktur PPID;
  - Mengusulkan ketersediaan anggaran di DIPA Pengadilan Negeri Marisa untuk pengadaan sarana berupa All In One PC dengan fitur layar sentuh untuk akses informasi secara digital oleh pengguna layanan di ruang PTSP serta anggaran untuk sosialisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
  - Bekerja sama dengan instansi terkait di daerah untuk sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

Marisa, 31 Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID)



David Mandagi, S.E., S.H.  
Panitera Muda Hukum